

Penguatan demokrasi indonesia melalui aktualisasi nilai-nilai pancasila

Afif Ramdlani Aziz

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail : afiframdhan24@gmail.com

Kata Kunci:

Pancasila, demokrasi indonesia, nilai, aktualisasi, partisipasi publik.

Keywords:

Pancasila, indonesian democracy, values, actualization, public participation.

ABSTRAK

Demokrasi di Indonesia senantiasa mengalami tantangan, mulai dari polarisasi politik, praktik politik uang, hingga lemahnya partisipasi publik yang substantif. Sementara itu, nilai-nilai dasar negara Pancasila yakni Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi landasan moral, etika, dan praksis dalam memperkuat sistem demokrasi Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menelaah bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat memperkuat

demokrasi Indonesia melalui pendekatan kualitatif naratif berbasis kajian pustaka. Temuan menunjukkan bahwa penerapan nilai Pancasila secara konsisten dalam pendidikan kebangsaan, etika politik, kelembagaan demokrasi, dan partisipasi warga dapat meningkatkan kualitas demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan sosial. Rekomendasi mencakup revitalisasi pendidikan karakter kebangsaan, reformasi kelembagaan demokrasi, serta penerapan literasi digital yang berpijak nilai Pancasila.

ABSTRACT

Democracy in Indonesia continuously faces challenges, ranging from political polarization, vote buying practices, to weak substantive public participation. Meanwhile, the foundational values of the state, Pancasila namely Belief in One Supreme God, Just and Civilized Humanity, The Unity of Indonesia, Democracy Guided by the Inner Wisdom of Deliberations/Representations, and Social Justice for All Indonesians have significant potential to serve as moral, ethical, and practical bases for strengthening Indonesia's democratic system. This article aims to examine how the actualization of Pancasila values can strengthen Indonesian democracy through a qualitative narrative approach based on literature review. Findings show that consistent implementation of Pancasila values in civic education, political ethics, democratic institutions, and citizen participation can enhance the quality of democracy that is inclusive, participatory, and socially just. Recommendations include revitalizing character education, reforming democratic institutions, and applying value-based digital literacy.

Pendahuluan

Demokrasi Indonesia berakar pada cita-cita luhur para pendiri bangsa yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Namun, dalam praktik kontemporer, demokrasi sering terjebak pada aspek procedural seperti pemilu dan representasi politik tanpa diimbangi dengan internalisasi nilai-nilai moral dan sosial dari Pancasila (Latif, 2011). Fenomena seperti politik uang, rendahnya etika pejabat publik, serta disinformasi di ruang digital menunjukkan adanya *gap* antara idealisme



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

demokrasi Pancasila dan realitas politik Indonesia. Artikel ini berargumen bahwa demokrasi Indonesia dapat diperkuat melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa, mulai dari pendidikan, politik, hingga ruang digital. Dengan pendekatan analitis, tulisan ini menguraikan lima aspek utama yaitu Pancasila sebagai basis nilai demokrasi, krisis nilai dalam praktik demokrasi modern, tantangan demokrasi di era digital, strategi aktualisasi nilai, serta implikasi terhadap masa depan demokrasi Indonesia.

Landasan Teoretis

Pancasila sebagai Ideologi dan Sistem Nilai

Nilai-nilai Pancasila tidak hanya merupakan simbol nasional, tetapi juga mencerminkan etika politik dan sosial yang mengikat seluruh warga dan institusi negara. Misalnya, sila pertama Ketuhanan, mengarah pada moralitas politik dan penghormatan terhadap pluralisme; sila kedua Kemanusiaan, menegaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia; sila ketiga Persatuan, menjadi landasan kohesi sosial; sila keempat Kerakyatan, menunjuk pada partisipasi dan musyawarah sebagai mekanisme demokrasi; dan sila kelima Keadilan Sosial, mengarahkan pada pemerataan dan kesejahteraan bersama.

Demokrasi Pancasila sebagai Model Demokrasi Indonesia

Konsep Demokrasi Pancasila menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia bukan hanya meniru model liberal Barat, melainkan berakar pada nilai lokal: musyawarah mufakat, representasi rakyat, dan keadilan sosial. Sebagai contoh, artikel “Demokrasi Pancasila: Landasan Nilai dan Prinsipnya dalam Membangun Sistem dan Etika Politik Indonesia” menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi panduan etis dan moral bagi kehidupan bernegara. (Ach. Fadlail, 2024)

Pembahasan

Penguatan demokrasi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologis dan moral bangsa. Demokrasi yang berlandaskan Pancasila bukan hanya menekankan pada kebebasan politik, tetapi juga pada keadilan sosial, kemanusiaan, dan musyawarah yang bijaksana. Dalam konteks modern, demokrasi yang sehat memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sebagaimana tercermin dalam nilai sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Faslah, 2024). Penerapan nilai ini dapat diwujudkan melalui aktivitas-aktivitas sosial, politik, dan digital yang memperkuat budaya partisipatif, transparansi, dan gotong royong di tengah masyarakat.

Kemajuan teknologi informasi membuka peluang baru bagi penguatan demokrasi melalui konsep e-demokrasi. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam berbagai kebijakan publik, menyampaikan aspirasi, serta mengawasi jalannya pemerintahan (Slamet et al., 2009). Aktivitas ini mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip keadilan sosial dan persamaan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui e-demokrasi, setiap warga dapat

memperoleh akses yang setara terhadap informasi dan ruang partisipasi politik, yang sejalan dengan semangat Pancasila dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Namun, globalisasi dan modernisasi juga menghadirkan tantangan bagi eksistensi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Arus budaya global dan perubahan sosial yang cepat dapat menggeser cara pandang masyarakat, terutama generasi muda, terhadap makna ideologi nasional (Anti Putri et al., 2025). Oleh karena itu, perlu adanya upaya penguatan nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan kritisisme konstruktif dan dialog antar generasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga relevansi Pancasila di tengah perubahan zaman dengan membuka ruang komunikasi lintas generasi. Melalui forum diskusi, lokakarya, dan kegiatan interaktif, generasi muda dan tua dapat saling bertukar pandangan, mengkritisi penerapan nilai-nilai kebangsaan, serta merumuskan langkah konkret untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam ranah pendidikan, sosial, dan digital.

Aktivitas nilai-nilai Pancasila dalam konteks demokrasi juga harus dikembangkan melalui pembinaan karakter, pendidikan kewarganegaraan, dan budaya partisipatif yang inklusif. Nilai persatuan Indonesia menjadi landasan penting untuk mencegah fragmentasi sosial akibat perbedaan pandangan politik maupun pengaruh global. Dialog yang terbuka dan saling menghargai menjadi kunci agar kritik terhadap kebijakan publik dapat disampaikan secara konstruktif, tanpa merusak tatanan sosial dan nilai kebangsaan. Dengan begitu, demokrasi Pancasila bukan hanya sistem politik, melainkan juga manifestasi moral bangsa yang menjunjung kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan. Melalui integrasi antara teknologi digital, dialog lintas generasi, dan pendidikan nilai-nilai Pancasila, demokrasi Indonesia dapat tumbuh menjadi demokrasi yang tidak sekadar prosedural, tetapi juga substantif dan berkeadilan. Aktivitas-aktivitas seperti forum e-demokrasi, pembelajaran Pancasila kontekstual, serta kritik konstruktif terhadap kebijakan publik merupakan bentuk konkret penguatan demokrasi yang sesuai dengan jati diri bangsa. Dengan menjadikan Pancasila sebagai roh dalam setiap aktivitas demokratis, Indonesia mampu membangun tatanan masyarakat yang beradab, terbuka, dan tetap berakar pada nilai-nilai luhur bangsa.

Krisis Nilai dan Degradasi Demokrasi di Era Modern

Pada era kontemporer, praktik demokrasi di Indonesia menunjukkan tanda-tanda melemahnya nilai-nilai yang seharusnya menjadi fondasi moral dan etika berbangsa. Sebagai contoh, menurut laporan terkini, skor Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2024 adalah 79,81, agak meningkat dari 79,51 tahun sebelumnya, namun masih berada di kategori “sedang”. Sedangkan lembaga The Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat bahwa peringkat Indonesia di indeks demokrasi global menurun dari 6,53 (2023) ke 6,44 (2024) dalam skala 0-10. (Malik, 2025) Pengamat politik menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya merujuk pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur demokrasi pemilu, partai politik, representasi berjalan, tetapi substansi nilai seperti musyawarah mufakat, keadaban, dan keadilan sosial belum optimal.

Lebih jauh, dalam praktik politik sehari-hari muncul tantangan seperti: biaya kampanye yang sangat tinggi, pengeluaran kampanye mencapai miliaran rupiah, polarisasi identitas, serta penggunaan politik uang yang mengubah demokrasi dari “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” menjadi “dari uang, oleh uang, untuk uang.” Situasi ini menunjukkan degradasi dari demokrasi idealitas menjadi demokrasi pragmatis. Dengan demikian, artikel ini berargumen bahwa tanpa revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks demokrasi Indonesia, maka demokrasi akan terus berada dalam jebakan proseduralisme tanpa kualitas moral dan sosial. Nilai-nilai Pancasila harus kembali menjadi pedoman, bukan sekadar simbol atau slogan.

Transformasi Digital dan Tantangan Demokrasi Pancasila

Salah satu persoalan paling nyata yang dihadapi demokrasi Indonesia dewasa ini adalah meningkatnya polarisasi sosial dan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga politik. Fenomena ini memperlihatkan bahwa demokrasi kita masih beroperasi secara prosedural tanpa diimbangi dengan kedewasaan etika dan konsolidasi nilai-nilai kebangsaan. Polarisasi politik yang mengeras, semakin memperlemah semangat kebangsaan. Media sosial menjadi arena utama perpecahan, di mana identitas agama, etnis, dan ideologi digunakan untuk menyerang lawan politik. Situasi ini bertentangan dengan semangat *Persatuan Indonesia* sebagaimana termaktub dalam sila ketiga Pancasila, yang mengajarkan integrasi sosial di atas kepentingan kelompok. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga dan keempat, harus diaktualisasikan kembali sebagai dasar rekonsiliasi sosial melalui pendekatan dialogis, deliberatif, dan berkeadaban. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam laporan tahun 2024 menegaskan bahwa nilai musyawarah dan gotong royong dapat menjadi antibodi ideologis terhadap polarisasi politik. Melalui pendekatan dialog lintas kelompok, pendidikan politik etis, dan penguatan ruang publik yang berimbang, Pancasila dapat berfungsi sebagai *common moral ground* yang merekatkan kembali kepercayaan sosial. Tanpa rekonsiliasi berbasis nilai, demokrasi berisiko terjebak dalam spiral kebencian dan fragmentasi sosial yang kronis.

Dengan demikian, pemulihan demokrasi Indonesia tidak dapat hanya dilakukan melalui reformasi kelembagaan, melainkan juga melalui revitalisasi moral dan spiritual yang bersumber dari Pancasila. Demokrasi sejati hanya akan tumbuh jika didukung oleh masyarakat yang saling percaya, beretika dalam berpolitik, dan menjunjung tinggi kemanusiaan serta persatuan sebagai prinsip hidup bersama. Di era digital, demokrasi Indonesia menghadapi dinamika dan tantangan baru yang membutuhkan perhatian nilai dan kebijakan. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan akses serta potensi baru bagi partisipasi publik, namun juga melahirkan risiko serius: hoaks, ujaran kebencian, polarisasi sosial, dan kesenjangan akses. (Wahidin et al., 2025)

Dalam konteks demokrasi, transformasi digital dapat memperkuat dua aspek: transparansi dan partisipasi. Namun jika tidak disertai literasi dan nilai yang kuat, maka digitalisasi malah memperkuat populisme, manipulasi opini, dan fragmentasi sosial. Riset terbaru mencatat bahwa peluang itu nyata tetapi tantangan seperti literasi rendah dan regulasi kurang memadai masih menghambat. (Wahidin et al., 2025). Maka dari itu, aktualisasi nilai-Pancasila dalam ranah digital menjadi sangat kritis, nilai Persatuan harus mencegah fragmentasi akibat echo-chamber, nilai Kemanusiaan harus

menegakkan penghormatan terhadap hak digital, nilai Kerakyatan menuntut partisipasi digital yang bermakna, bukan sekadar klik dan share, nilai Keadilan Sosial menghendaki akses digital yang merata dan adil.

Strategi Aktualisasi Nilai Pancasila untuk Penguatan Demokrasi

Upaya penguatan demokrasi Indonesia melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara sistematis dan relevan dengan tantangan zaman. Strategi tersebut tidak cukup hanya menekankan aspek ideologis, tetapi juga perlu diwujudkan dalam kebijakan pendidikan, regulasi politik, tata kelola digital, dan etika kepemimpinan. Salah satu strategi mendasar adalah integrasi pendidikan nilai Pancasila dalam literasi digital dan partisipasi publik. Data menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat Indonesia masih dalam tahap yang perlu diperkuat: misalnya, pada tahun 2024 angka literasi digital nasional tercatat baru mencapai sekitar **62 %**, di bawah rata-rata ASEAN yang diperkirakan 70 % (Wahyono, 2024). Selain itu, menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), program Gerakan Nasional Literasi Digital telah melatih lebih dari **24,6 juta peserta** hingga akhir 2023, namun masih terdapat jurang besar antara akses infrastruktur dan pemanfaatan literasi digital secara bermakna (Rohman, 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kapasitas teknis mulai terbentuk, kesadaran nilai, etika dan tanggung jawab dalam ruang digital masih lemah.

Dalam konteks ini, kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan Pancasila di seluruh jenjang pendidikan perlu diperbarui agar mencakup dimensi *digital civility* atau kesantunan digital. Artinya, nilai-nilai seperti gotong royong, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial harus diajarkan sebagai dasar berinteraksi dalam ruang digital, bukan hanya sebagai teori formal. Pendidikan semacam ini penting untuk menanamkan kesadaran bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan sosial. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi perlu diarahkan untuk memperkuat demokrasi partisipatif yang inklusif. Data indeks masyarakat digital menunjukkan bahwa pada tahun 2024 skor Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) mencapai 43,34 masih rendah untuk menunjukkan kesiapan masyarakat dalam menggunakan teknologi untuk partisipasi politik dan sosial secara bermakna (Mohammad, 2024). Untuk itu, pemerintah melalui BPIP dan Kemendikbud perlu memperkuat program literasi digital berbasis Pancasila, bukan hanya keterampilan teknis tetapi juga kesadaran bahwa kebebasan berekspresi di ruang siber harus dijalankan dengan tanggung jawab moral dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah penanaman etika kepemimpinan dan politik yang berlandaskan nilai-Pancasila. Demokrasi Pancasila menuntut hadirnya pemimpin yang memiliki integritas moral, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, serta semangat musyawarah untuk kepentingan bersama. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak partai politik masih berorientasi pada popularitas elektoral, bukan moralitas publik. Pengamat politik menyebut bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya merujuk pada nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam hal kebijaksanaan dan keadilan sosial (Harbowo, n.d.). Karena itu, partai politik perlu menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam program pendidikan politik dan

struktur kaderisasi agar melahirkan pemimpin yang tidak hanya cerdas secara politik tetapi juga berintegritas moral.

Dengan demikian, strategi aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penguatan demokrasi dapat dirangkum dalam tiga dimensi utama. Pertama, dimensi individu: pembentukan karakter warga negara yang melek digital dan berlandaskan moral Pancasila. Kedua, dimensi kelembagaan: reformasi lembaga politik agar lebih transparan dan akuntabel dengan prinsip keadilan sosial dan musyawarah. Ketiga, dimensi struktural: pembangunan kebijakan publik yang menjamin keadilan digital, kedaulatan data nasional, dan pemerataan partisipasi politik. Melalui tiga dimensi tersebut, demokrasi Indonesia diharapkan dapat bergerak menuju sistem yang tidak hanya menjunjung tinggi kebebasan politik, tetapi juga berakar kuat pada nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan oleh Pancasila.

Demokrasi Ekologis: Implementasi Nilai Keadilan Sosial dalam Isu Lingkungan

Di tengah arus globalisasi dan krisis iklim, demokrasi modern tidak hanya dituntut untuk menjamin kebebasan politik, tetapi juga keberlanjutan kehidupan manusia dan alam. Konsep *demokrasi ekologis* muncul sebagai gagasan yang menautkan hak politik warga dengan tanggung jawab ekologis negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini memiliki kesesuaian langsung dengan sila kelima dari Pancasila yang tidak hanya mencakup keadilan ekonomi dan sosial, tetapi juga keadilan lingkungan. Demokrasi ekologis menegaskan bahwa rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kebijakan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, serta berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Namun kenyataannya di Indonesia menunjukkan tantangan serius: eksploitasi alam yang berlebihan, lemahnya penegakan hukum lingkungan, serta marginalisasi masyarakat adat masih menjadi persoalan utama. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan lingkungan harus menjadi bagian integral dari reformasi demokrasi Indonesia. Penerapan prinsip *green democracy* yaitu demokrasi yang memperhatikan keberlanjutan ekologis dapat diwujudkan melalui keterlibatan publik dalam rekayasa kebijakan energi, konservasi, dan penataan ruang. Kerangka kerja pembangunan hijau, ini akan menjadi sangat relevan ketika dihubungkan dengan nilai-Pancasila: ketika keadilan sosial diperluas hingga ke ranah ekologis, maka Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga kompas moral bagi masa depan peradaban Indonesia yang berkelanjutan.

Kesimpulan dan Saran

Demokrasi Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak era reformasi, dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, kebebasan berpendapat, dan terbukanya akses terhadap ruang publik digital. Namun, di balik kemajuan tersebut masih terdapat berbagai persoalan mendasar, seperti lemahnya etika politik, maraknya politik uang, dan menurunnya kualitas diskursus publik akibat disinformasi dan polarisasi di media sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar ideologinya. Pancasila, dengan lima sila yang saling berkaitan, menawarkan kerangka nilai yang sangat relevan untuk memperkuat demokrasi substansial. Nilai Ketuhanan menuntun moralitas politik,

Kemanusiaan menegaskan penghormatan terhadap hak asasi, Persatuan menjadi fondasi integrasi nasional, Kerakyatan menekankan musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, sementara Keadilan Sosial menjadi tujuan akhir dari seluruh proses demokratis. Aktualisasi nilai-nilai ini menuntut komitmen kolektif dari pemerintah, lembaga politik, dunia pendidikan, dan masyarakat sipil agar demokrasi Indonesia tumbuh tidak hanya secara prosedural, tetapi juga bermakna secara etis dan sosial.

Dalam konteks modern, penerapan nilai-nilai Pancasila perlu diwujudkan melalui integrasi pendidikan karakter dan literasi digital berbasis moral kebangsaan. Pemerintah bersama lembaga pendidikan perlu menanamkan kesadaran bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital harus diiringi tanggung jawab sosial dan etika publik. Di sisi lain, lembaga penyelenggara pemilu dan partai politik perlu menjadikan Pancasila sebagai acuan normatif dalam pengelolaan sistem politik agar setiap proses demokrasi mencerminkan keadilan dan transparansi. Kepemimpinan nasional pun diharapkan tidak hanya berorientasi pada popularitas elektoral, melainkan juga pada keteladanan moral, kebijaksanaan, serta tanggung jawab sosial. Masyarakat sipil dan generasi muda memiliki peran yang sama pentingnya dalam menjaga roh demokrasi Pancasila. Partisipasi aktif dalam forum deliberatif, sikap kritis terhadap politik transaksional, dan keterlibatan dalam literasi digital berbasis nilai-nilai kebangsaan akan memperkuat daya tahan demokrasi dari pengaruh negatif globalisasi dan disrupsi teknologi. Dengan demikian, penguatan demokrasi Indonesia hanya dapat terwujud apabila nilai-nilai Pancasila tidak berhenti sebagai doktrin ideologis, tetapi benar-benar dihidupkan dalam praktik politik, pendidikan, dan kehidupan publik sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Ach. Fadlail. (2024). Demokrasi Pancasila: Landasan Nilai Dan Prinsipnya Dalam Membangun Sistem Dan Etika Politik Indonesia. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(1), 403–413. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i1.3995>
- Anti Putri, V. F., Pratiwi, I. H., & Hidayatullah, A. D. (2025). Kritisisme Konstruktif dan Dialog Antar Generasi: Mewujudkan Pancasila yang Relevan di Era Globalisasi. *ARembeN Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 3(1), 25–34. <https://repository.uin-malang.ac.id/24556/>
- Faslah, R. (2024). *Identitas Nasonoal Geostrategi & Geopolitik*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <https://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Harbowo, N. (n.d.). *Kepercayaan Publik Rendah, DPR Diminta Berbenah*. Retrieved November 8, 2025, from <https://www.kompas.id/artikel/kepercayaan-publik-rendah-dpr-diminta-berbenah>
- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Malik, S. (2025). *Kesaktian Pancasila, Demokrasi, dan Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat*. <https://news.detik.com/kolom/d-8137919/kesaktian-pancasila-demokrasi-dan-jalan-menuju-kesejahteraan-rakyat>

- Mohammad, N. (2024). *Skor Indeks Masyarakat Digital Indonesia Meningkat pada 2024*. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66f6acc4d02f7/skor-indeks-masyarakat-digital-indonesia-meningkat-pada-2024>
- Rohman, F. (2024). *Kemenkominfo latih lebih 24 juta orang tentang literasi digital*—ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/3905859/kemenkominfo-latih-lebih-24-juta-orang-tentang-literasi-digital>
- Slamet, Hamdan, A. R. bin, & Deraman, A. (2009). E-Demokrasi Di Indonesia, Antara Peluang dan Hambatan Pendekatan Fenomenologis. *semnasIF*, 1(4), 85–93. <https://repository.uin-malang.ac.id/10741/>
- Wahidin, D., Utami, I. S., Amalia, A. R., Aqida, A., & Aidah, S. (2025). Opportunities and Challenges of Digital Democracy in Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.723>
- Wahyono. (2024). *Literasi Digital Baru Capai 62 Persen, Ini Tantangan Dunia Pendidikan Indonesia*. <https://edukasi.sindonews.com/newsread/1452251/212/literasi-digital-baru-capai-62-persen-ini-tantangan-dunia-pendidikan-indonesia-1725883764>